

ABSTRAK

Pembangunan bertujuan memberikan pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat agar tercipta kesejahteraan. Masalah kemiskinan menjadi salah satu masalah yang mendapatkan perhatian lebih dari dunia. Dalam SDGs isu kemiskinan menjadi salah satu tujuan utama dari 17 tujuan SDGs. Kemiskinan merupakan permasalahan yang krusial serta multidimensional yang dihadapi oleh Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang dihadapkan permasalahan kemiskinan yang dianggap serius. Berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan dikeluarkan dan diimplementasikan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Kebijakan tersebut dinilai masih belum memberikan dampak yang signifikan tidak terkecuali pada Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang yang notabene adalah daerah penyokong ibu kota provinsi Jawa Tengah yang secara geografis mendapatkan keuntungan untuk bisa lebih sejahtera tetapi malah sebaliknya. Kebijakan dan program yang ada perlu di evaluasi untuk menemukan input perbaikan kebijakan penanggulangan kemiskinan untuk menurunkan jumlah kemiskinan. Pada penelitian ini tahapan kebijakan yang digunakan adalah tahapan pasca-pelaksanaan yang dimana pada tahapan ini menilai apakah kebijakan tersebut baik atau tidak. Level kebijakan penanggulangan kemiskinan pada penelitian ini adalah pada level daerah yaitu kebijakan yang berasal dari provinsi atau kabupaten. Kebijakan yang digunakan adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan tahun 2020.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan mengetahui kebijakan penanggulangan kemiskinan apa yang paling efektif yang ada di Kecamatan Suruh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan teknik sekunder dan primer, dimana sekunder dengan telaah dokumen sedangkan yang primer menggunakan wawancara online. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deksriptif, analisis ceklis dan metode analisis before after. Hasil penelitian dengan menggunakan instrumen ceklis menemukan bahwa kebijakan yang paling banyak memiliki keterkaitan dengan pendekatan berbasis aset dan penghidupan berkelanjutan dan dapat dikatakan paling efektif di Kecamatan Suruh ada Program Keluarga Harapan dan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni. Kebijakan tersebut adalah kebijakan yang berasal dari Pemerintah Pusat sehingga memiliki rencana dan pelaksanaan yang baik. Hasil wawancara menunjukan bahwa kebijakan yang telah dilaksanakan sangat bermanfaat bagi masyarakat di masa pandemi covid-19, sedangkan hasil evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Semarang yang dilakukan dengan indikator kemiskinan secara umum dinilai masih belum bisa mengatasi kemiskinan yang ada karena adanya pandemi covid-19 yang terjadi.

Kata Kunci: Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Evaluasi Kebijakan.